

People. Innovation. Excellence.



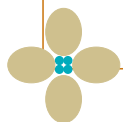
ISSN: 2087-1236

Volume 6 No. 1 Januari 2015



humaniora

Language, People, Art, and Communication Studies



humaniora	Vol. 6	No. 1	Hlm. 1-146	Jakarta Januari 2015	ISSN: 2087-1236
-----------	--------	-------	---------------	-------------------------	--------------------

HUMANIORA

Language, People, Art, and Communication Studies

Vol. 6 No. 1 Januari 2015

Pelindung	Rector of BINUS University	
Penanggung Jawab	Vice Rector of Research and Technology Transfer	
Ketua Penyunting	Endang Ernawati	
Penyunting Pelaksana Internal		
Akun	Dahana	Trisnawati Sunarti N
Retnowati	Sofi	Dila Hendrassukma
Agnes Herawati	Sri Haryanti	Dominikus Tulasi
Ienneke Indra Dewi	Sugiato Lim	Ulani Yunus
Menik Winiharti	Xuc Lin	Lidya Wati Evelina
Almodad Biduk Asmani	Shidarta	Aa Bambang
Nalti Novianti	Besar	Nursamsiah Asharini
Rosita Ningrum	Bambang Pratama	Rahmat Edi Irawan
Elisa Carolina Marion	Mita Purbasari Wahidiyat	Muhammad Aras
Ratna Handayani	Lintang Widyokusumo	Frederikus Fios
Linda Unsriana	Satrya Mahardhika	Yustinus Suhardi Ruman
Dewi Andriani	Danendro Adi	Tirta N. Mursitama
Rudi Hartono Manurung	Tunjung Riyadi	Johanes Herlijanto
Roberto Masami	Budi Sriherlambang	Pingkan C. B. Rumondor
Andyni Khosasih	Yunida Sofiana	Juneman
Penyunting Pelaksana Eksternal		
Ganal Rudiyanto	Universitas Trisakti	
Editor/Setter	I. Didimus Manulang Haryo Sutanto Holil Atmawati	
Sekretariat	Nandya Ayu Dina Nurfitri	
Alamat Redaksi	Research and Technology Transfer Office Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek, Jl. Kebon Jeruk Raya 27 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. 021-5350660 ext. 1705/1708 Fax 021-5300244 Email: ernaw@binus.edu, nayu@binus.edu	
Terbit & ISSN	Terbit 4 (empat) kali dalam setahun (Januari, April, Juli dan Oktober) ISSN: 2087-1236	

HUMANIORA

Language, People, Art, and Communication Studies

Vol. 6 No. 1 Januari 2015

DAFTAR ISI

Erni Herawati Etika dan Fungsi Media dalam Tayangan Televisi Studi pada Program Acara <i>Yuk Keep Smile</i> di Trans TV	1-10
Rani Agias Fitri Sumber dan Cara Mengatasi Rasa Bersalah pada Wanita Perokok yang Memiliki Anak Balita	11-20
Annisa Kusuma Widjaja; Moondore Madalina Ali Gambaran Celebrity Worship pada Dewasa Awal di Jakarta.....	21-28
Wira Respati Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014.....	29-38
Don K. Marut; Geradi Yudhistira Peran Masyarakat dalam Pencapaian Millenium Development Goals 2015 dan Tantangan Pasca 2015: Studi 8 Kabupaten Indonesia.....	39-50
Timur Sri Astami Strategi Permintaan dalam Bahasa Jepang.....	51-58
Hendri Hartono; D. Nunnun Bonafix Fenomena Aplikasi Pengolah Foto Digital pada Ponsel Pintar di Masyarakat Kota	59-66
Andreas James Darmawan; Dyah Gayatri Putri Analisis dan Strategi Komunikasi Perancangan Program Edutainment "Seri Aktivitas Alam: Gunung Meletus".....	67-76
Bhernadetta Pravita Wahyuningtyas Aroma sebagai Komunikasi Artifaktual Pencetus Emosi Cinta: Studi Olfactics pada Memory Recall Peristiwa Romantis.....	77-85
Silverius CJM Lake Alternatif Pengembangan Pendidikan Berdasarkan "Nilai" Kebutuhan Khusus.....	86-96
Lidya Wati Evelina; Mia Angeline Upaya Mengatasi GOLPUT pada Pemilu 2014.....	97-105
Devi Kurniawati Homan Garis dan Titik Berdasarkan Riset Visual.....	106-112
Puspita Putri Nugroho; Vera Jenny Basiroen Alternative Design for Visual Identity of Yayasan Batik Indonesia.....	113-122
Andy Gunardi Mistisisme Baru: Teilhard De Chardin.....	123-134
Dewi Nurhasanah Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann dalam Novel <i>Orang-orang Proyek</i> Karya Ahmad Tohari	135-146

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015 DAN TANTANGAN PASCA 2015: STUDI 8 KABUPATEN INDONESIA

Don K. Marut; Geradi Yudhistira

International Relations, Faculty of Humanities, BINUS University
Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan–Palmerah, Jakarta 11480
donmarut@yahoo.com; gyudhistira@binus.edu

ABSTRACT

In September 2000, the United Nations General Assembly adopted a declaration called Millennium Declaration, which has been detailed down into goals and targets of what is well-known as Millennium Development Goals (MDGs). Indonesia has committed to achieve MDGs. Until 2010 the MDGs achievements for Indonesia have been identified as mostly off-the-track. Some districts, however, have shown significant achievements and the processes of the achievements are worth noted. The process of MDGs achievements need special emphasis since this can become foundation for MDGs achievements and for sustainable performance in the districts. This paper analyzes roles of different stakeholders, including local communities, in 8 districts/cities in 8 provinces. There are success stories that are recommended to be replicated to other districts/cities in Indonesia.

Keywords: MDGs, people's participation, development

ABSTRAK

Pada September 2000 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang disebut Deklarasi Milenium, yang telah dirinci ke dalam tujuan dan sasaran yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai MDGs. Hingga 2010 pencapaian sebagian besar MDGs Indonesia teridentifikasi off-the-track. Bagaimanapun juga, beberapa kabupaten telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dan proses pencapaiannya layak diperhatikan. Capaian MDGs membutuhkan penekanan khusus karena dapat menjadi landasan bagi pencapaian MDGs dan kinerja berkelanjutan di kabupaten. Penelitian ini menganalisis peran para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, di 8 kabupaten/kota di 8 provinsi. Ada kisah sukses yang direkomendasikan untuk ditiru di kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Kata kunci: MDGs, partisipasi masyarakat, pembangunan

PENDAHULUAN

Pada bulan September 2000 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi deklarasi no. 55/2 yang disebut *United Nations Millennium Declaration*. Deklarasi ini kemudian dirinci dalam delapan tujuan dengan target-target pembangunan yang spesifik, yang terkenal dengan nama *Millennium Development Goals* (MDGs), yang harus dicapai pada tahun 2015. MDGs adalah komitmen dan tekad bersama dengan indikator-indikator target yang terukur. Tahun 2015 sudah mendekat dan apa yang dicapai oleh masing-masing Negara anggota PBB, khususnya Indonesia.

Indonesia sebenarnya bisa mencapai cita-cita tersebut dalam waktu yang telah ditenggatkan, jika dari awal pemerintah sudah mensosialisasikan dan mengintegrasikan MDGs dalam prioritas-prioritas pembangunan nasional. Indonesia mengalami masalah pada 5 tahun pertama pelaksanaan MDGs karena Indonesia masih dalam masa pemulihan setelah krisis finansial dan krisis sosial yang melanda berbagai daerah. Hal ini diperparah dengan bencana-bencana alam yang terjadi secara beruntun di beberapa daerah seperti Tsunami Aceh, Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Banjir di Sumatra Utara, dan berbagai daerah lainnya. Meskipun demikian, di beberapa daerah (8 kabupaten/kota yang menjadi sasaran studi ini) terlihat ada peningkatan capaian yang cukup berarti, seperti menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat kematian ibu dan anak, air minum bersih yang menjangkau hampir seluruh warga, penurunan tingkat buta huruf, peran perempuan yang meningkat, dan sebagainya. Capaian yang diraih oleh 8 daerah tersebut cukup bervariasi dan tidak merata pada semua tujuan MDGs. Sementara itu daerah-daerah lain di timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Gorontalo, capaian target-target MDGs sangat lambat.

Meskipun baru pada 2010 MDGs diintegrasikan dalam kebijakan operasional pembangunan di tingkat nasional dan daerah, beberapa daerah telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan baik dari segi pencapaian target MDGs maupun dari proses pencapaian target-target MDGs tersebut. 'Proses pencapaian' target MDGs ini sangat penting mendapat penekanan tersendiri karena 'proses pencapaian' ini meletakkan fondasi yang kuat untuk pencapaian dan keberlanjutan capaian MDGs di daerah-daerah tersebut. Tulisan ini akan membahas peran berbagai stakeholders, terutama komunitas local, dalam pencapaian MDGs di beberapa Kabupaten/Kota di 8 Provinsi.

Diharapkan hasil kajian dan tulisan ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah dan para aktor pembangunan lainnya tentang aspek-aspek yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan dan aspek-aspek yang potensial menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tersebut.

Landasan Teori

Dalam beberapa dekade terakhir, pertanyaan kritis mengenai apa peran aktif yang bisa diambil masyarakat dalam kebijakan pembangunan makin mengemuka. Depoe dan Delicath (2004) mengemukakan beberapa kelemahan dalam mekanisme partisipasi tradisional seperti dengar pendapat atau komentar dari masyarakat, misalnya: (1) partisipasi publik berjalan dalam model-model teknokratis, yang mana pembuat kebijakan, pejabat administratif dan para ahli melihat peran mereka sebagai pihak yang mendidik dan mengajak masyarakat untuk melegitimasi kebijakan mereka; (2) partisipasi publik sering kali terjadi terlambat dalam proses pembuatan kebijakan, bahkan terkadang setelah kebijakan selesai dibuat; (3) partisipasi publik sering kali mengikuti garis permusuhan, jika proses partisipasi masyarakat dilakukan di dalam mode "membuat kebijakan-mengumumkan-bertahan" dari para pejabat; (4) partisipasi publik sering kehilangan mekanisme dan forum untuk menginisiasi dialog di antara *stakeholders*; (5) partisipasi masyarakat sering tidak terlembagakan karena tidak adanya panduan dan aturan yang menjamin bahwa partisipasi publik tersebut efektif dan masukan-masukan dari masyarakat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, banyak

peneliti mengajukan beberapa konsep baru tentang partisipasi masyarakat yang efektif dan bermanfaat, dengan beberapa asumsi seperti: (a) masyarakat harus berpendapat tentang kebijakan yang memengaruhi hidupnya; (b) di awal dan di dalam proses partisipasi, masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan informasi yang jelas dan diberdayakan; (c) masyarakat harus dilibatkan dalam memutuskan bagaimana mereka akan berpartisipasi, dalam memilih forum dan mekanisme yang akan digunakan dalam mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan.

Menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (2007:3), partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Juli 2012 di 8 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi. Delapan Kabupaten tersebut mencakup: Maros (Sulawesi Selatan), Padang Panjang (Sumatera Barat), Kebumen (Jawa Tengah), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Kupang (NTT), Lombok Timur (NTB) dan Barito Kuala (Kalimantan Selatan). Beberapa Kabupaten lain juga dikunjungi sebagai perbandingan seperti Halmahera Utara (Maluku Utara) dan Gunung Kidul (DIY). Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan wawancara individual terstruktur dan diskusi kelompok terfokus dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik, serta diskusi bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memverifikasi temuan-temuan sementara dari wawancara individual dan diskusi kelompok terfokus. Wawancara individual dilakukan dengan para kepala dinas dan BAPPEDA dan Kepala Badan dan Kantor, dan wakil bupati di beberapa Kabupaten/Kota. Studi kepustakaan dengan mengkaji laporan-laporan pemerintah daerah, RPJMD dan RKPD juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Masyarakat Sipil Indonesia Tentang Pencapaian MDGs

Pada 2007, kelompok masyarakat sipil Indonesia menerbitkan laporan MDGs yang mengungkapkan bahwa sebagian besar MDGs di Indonesia menunjukkan kecenderungan gagal untuk dicapai (*off-the-track*). Pada 2010/2011 laporan masyarakat sipil Indonesia memaparkan bahwa MDGs di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada akan dicapai pada 2015. Berikut adalah ringkasan dari laporan masyarakat sipil Indonesia yang dibuat oleh Jaringan MDGs, yang dikoordinasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan didukung oleh Kemitraan pada 2011.

Kemiskinan

Jika dilihat dari segi persentase, kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Namun jika dilihat dari aspek kualitas kemiskinan dan kerentanan terhadap kemiskinan, ada kecenderungan negatif. Salah satu indikatornya adalah angka kerawanan pangan yang masih mengancam daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur dan Kalimantan (WFP, 2009). Akses terhadap sumber pangan untuk daerah-daerah terpencil sangat sulit karena buruknya infrastruktur dan sulitnya mengakses sumber-sumber energi. Selain itu gejala perubahan iklim juga mengacaukan siklus tanam dan panen tanaman pangan.

Pendidikan

Program wajib belajar yang dibarengi dengan program sekolah gratis, belum sepenuhnya terwujud, dan belum bisa menghilangkan biaya tambahan dan pungutan-pungutan liar. Angka putus sekolah antara kelas 1 sampai kelas 3 SD masih tinggi terutama untuk perempuan. Ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka buta aksara bagi perempuan usia 15+ tahun, yang membawa dampak lanjutan yang cukup berarti seperti kawin usia dini, menjadi korban *trafficking*, dan masalah sosial lainnya. Pemerataan layanan dan mutu pendidikan antar-provinsi juga masih merupakan tantangan (Jawa Pos News Network, 2013). Hingga kini 11 dari 33 provinsi masih mengalami masalah dalam Angka Putus Sekolah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah.

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Angka partisipasi murni perempuan dalam pendidikan masih merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Beban sekolah untuk keluarga miskin yang tidak bertanggung sering mengorbankan anak perempuan untuk meninggalkan sekolah. *Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, ternyata masih hanya merupakan wacana di tingkat nasional di kalangan pejabat di lembaga-lembaga terkait dan di kalangan aktivis. Implementasi CEDAW masih jauh dari harapan meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk pengarusutamaan gender. Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 263%, dari 54.425 kasus pada 2008 menjadi 143.586 kasus pada 2009 (Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, 2010). Hal ini diperparah oleh banyaknya proses peradilan yang masih bias gender, seperti pada berbagai kasus perkosaan dan pelecehan seksual.

Kematian bayi

Penurunan kematian bayi secara nasional cukup menjanjikan, tetapi penghitungan antar-provinsi masih menjadi tantangan tersendiri. Jumlah bayi yang mengalami gizi buruk dan kelainan pertumbuhan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah pedesaan dan didaerah-daerah terpencil.

Angka Kematian Ibu

Tinggi rendahnya angka kematian ibu pada masa hamil, saat persalinan, dan pasca-persalinan ditentukan oleh sistem dan mekanisme penanganan persalinan. Di banyak provinsi (lebih dari 50% provinsi) pengawasan kehamilan, penanganan kelahiran dan penanganan pasca-melahirkan masih bersifat “rumahan”. Ibu lebih memilih persalinan di rumah ketimbang di rumah sakit, terutama karena akses ke rumah sakit dan keyakinan individual yang lebih memilih melahirkan di dekat keluarga.

Lingkungan, air, dan sanitasi

Menurut Menteri Kehutanan laju deforestasi dan degradasi hutan menurun dari 3,5 juta hektar/tahun pada periode 1998–2003 menjadi 450 ribu hektar/tahun pada periode 2011-2012 (Hasan, 2013). Laju deforestasi seperti ini sebenarnya masih cukup memprihatinkan. Air bersih dan sanitasi masih merupakan tantangan tersendiri dan menjadi sumber utama rendahnya mutu kehidupan di desa-desa dan sebagian wilayah perkotaan. Mekanisme PPP (*Private-Public Partnership*) untuk air minum di daerah-daerah yang kebanyakan penduduknya memiliki daya beli rendah justru membebani penduduk, apalagi perusahaan pengelola lebih berorientasi keuntungan. Menurut kelompok masyarakat sipil PPP di Ambon, Sorong, Merauke, Biak, dan sebagainya sebaiknya ditinjau kembali. Buruknya air minum dan sanitasi kampung di wilayah pedesaan menjadi sumber utama penyakit-penyakit terkait: cacangan, malaria, demam berdarah, *cholera*, disentri, dan sebagainya. Kualitas perumahan juga hampir tidak menjadi perhatian pemerintah, terutama di wilayah pedesaan, padahal kondisi rumah huni sangat menentukan kesehatan, kenyamanan, hubungan sosial dari penduduk.

Capaian MDGs di 8 Provinsi

Di antara kecemasan karena indikasi *off-the-track* dari pencapaian MDGs di Indonesia, beberapa daerah mengalami kemajuan dan bahkan sangat signifikan. Ada beberapa faktor penting yang membuat beberapa daerah dapat menjalankan program-program pembangunan dengan mengintegrasikan MDGs.

Pemerintahan lokal yang transparan dan partisipatif

Dalam review lima tahunan pencapaian target-target MDGs, Dokumen World Summit 2005 menekankan pentingnya peranan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan, khususnya MDGs. Dokumen tersebut menyatakan bahwa implementasi strategi-strategi pembangunan yang efektif mensyaratkan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, *equitable*, inklusif, efisien, responsive dan partisipatif, yang didasarkan pada aturan hukum. (UN-DESA, 2007:1–2)

Good governance diberi atribut pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Partisipasi mencakup akses rakyat, baik sebagai kelompok maupun individu, terhadap semua tahap proses kebijakan, yang mencakup perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan transparansi memungkinkan partisipasi dengan mendorong semua *stakeholders* untuk bertindak sebagai penyumbang yang aktif, produktif dan memiliki informasi yang memadai dalam proses-proses kebijakan. Partisipasi dan transparansi memberi efek yang positif terhadap efisiensi, alokasi sumberdaya yang tepat dan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini menemukan beberapa pencapaian MDGs di beberapa Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut. Pertama, Kota Padang Panjang dalam hampir semua target MDGs, dalam bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kematian bayi dan angka kematian ibu, sudah melampaui target-target. APBD setiap tahun diumumkan dalam bentuk poster dan dipajang di tempat-tempat umum seperti kantor kelurahan, kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), rumah sakit, sekolah, dan bahkan di terminal bis.

Kedua, kabupaten Kebumen sudah menuju ke arah yang baik sejak 2009. Angka kemiskinan menurun setiap tahun; angka kematian ibu menurun; angka kematian bayi menurun; air dan sanitasi meningkat. Model Kebumen bisa diambil sebagai contoh yang menarik. Setiap bulan setiap *stakeholder* yang terlibat dalam program pembangunan (SKPD dan masyarakat sipil) secara bergilir melaporkan capaian dan kendala implementasi programnya ke semua *stakeholder* yang lain. Perencanaan pembangunan setiap tahun melalui Musrenbang dijalankan secara sungguh-sungguh dengan partisipasi murni dari masyarakat desa. Beberapa desa sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dibuat secara partisipatif oleh warga desa mulai dari tingkat RT dan Dusun sampai Desa, dan melibatkan perempuan, laki-laki dan pemuda/i secara terpisah dan gabungan. Semua program/proyek yang berasal dari luar bisa diterima kalau sesuai dengan rencana tahunan yang ditetapkan di dalam RPJMDesa.

Ketiga, Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan kecenderungan yang positif dalam semua target MDGs. Keempat, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Maros secara pelan juga mengarah kepada kecenderungan yang positif. Kabupaten Maros oleh media local disebut sebagai Kabupaten MDGs. “Kalau mau belajar tentang MDGs, datanglah ke Maros”. Di Mamuju, *open government* sedang dipersiapkan, dan manajemen keuangan daerah sudah mulai dilakukan secara transparan. Tantangan LSM kepada pemerintah untuk transparan ditanggapi secara positif dan lebih progresif dengan menjalankan mekanisme pemerintahan terbuka. *Participatory and transparent governance* ini didukung oleh *leadership* yang kuat dan berjalannya mekanisme koordinasi dan kontrol yang kuat, dan tekad bersama seluruh jajaran pemerintahan untuk membangun kabupaten lebih baik.

Rasa kepemilikan (*ownership*) dan partisipasi dalam pembangunan

MDGs pada umumnya masih dipandang sebagai proyek pemerintah yang bersifat jangka pendek, dan terkesan didorong secara eksternal sehingga tidak mencerminkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Sepuluh tahun sejak dideklarasikannya, MDGs belum diinternalisasikan sebagai tujuan pembangunan rakyat. Jika dicermati, tujuan 1 hingga tujuan 7 merupakan masalah kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, hal tersebut belum diintegrasikan sebagai agenda pembangunan bagi masyarakat miskin.

Pembangunan akan berhasil apabila masyarakat mempunyai rasa kepemilikan atas program itu sendiri. Untuk memupuk rasa kepemilikan tersebut, perencanaan program harus datang dari masyarakat. Jika masyarakat memiliki pengetahuan atau pemahaman yang terbatas tentang apa yang mereka hadapi dalam kehidupan maka perlu didampingi atau diberdayakan untuk mencapai tingkat kesadaran tertentu. Perasaan memiliki tersebut sering diremehkan oleh sebagian besar perencana dan praktisi pembangunan. Pada prakteknya pembangunan dinikmati oleh para aktor dan elite, dan bukan penerima manfaat secara luas. Sehingga tujuan pembangunan juga bukan ditentukan oleh rakyat, tetapi oleh pelaku pembangunan yang berada di luar ruang kehidupan yang dijalani oleh rakyat.

Pemimpin masyarakat adat di Pulau Kei Besar, Maluku, pernah menyatakan kepada penulis bahwa masyarakat adat tidak menentang proses pembangunan. Namun mereka tidak setuju dengan pembangunan yang dirancang dan dipaksakan dari luar dan tidak sesuai dengan kebutuhan, hak dan visi masyarakat. Keragaman kebutuhan masyarakat tersebut didasarkan pada perbedaan pada sejarah dan kondisi alam dan lingkungan setiap masyarakat. Jika visi tersebut tidak sejalan dengan visi anggota masyarakat yang lebih luas atau visi pemerintah nasional, maka proses konsultasi yang demokratis adalah sarana terbaik untuk menjembatani visi yang berbeda itu. Substansi maupun target dalam MDGs sangat relevan dengan kebutuhan dan hak-hak rakyat.

Dalam dua penelitian yang dilakukan oleh INFID pada 2007 (Penelitian mengenai Proyek Pembangunan Kecamatan - PPK) (Dahniar & Lasimpo, 2008) dan pada 2010 (Penelitian mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - PNPM) (Aditjondro, 2010) terungkap bahwa proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan dari donor internasional yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bahkan telah merusak sendi-sendi inisiatif rakyat, yang dikhawatirkan bisa mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat lokal pada masa depan.

Indonesia sebenarnya memiliki berbagai contoh pengalaman terbaik dan prestasi keberhasilan program, yang rasa memiliki dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci, misalnya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan Keluarga Berencana. Posyandu dapat dipertahankan oleh masyarakat, terutama perempuan, bukan hanya karena Posyandu mampu menjawab kebutuhan rakyat melainkan terutama karena telah menjadi milik masyarakat. Masyarakat masih mempertahankan Posyandu dengan menggunakan sumber daya sendiri yang tersedia dan dengan semangat sukarela.

Hal ini tidak hanya memaksimalkan penerapan mekanisme yang sudah akrab dan dimiliki oleh masyarakat, tetapi juga mendorong kesetaraan gender, bahwa laki-laki juga ikut berpartisipasi dalam Posyandu. Perempuan di tingkat masyarakat menganggap PKK sebagai organisasi yang menyediakan ruang bagi mereka untuk memberdayakan diri. Masyarakat saat ini menginginkan program keluarga berencana yang sebelumnya telah mampu memberikan informasi yang tepat tentang bagaimana mengurangi angka kelahiran, dan juga untuk pengembangan kapasitas terkait perawatan ibu dan pengasuhan anak serta ekonomi rumah tangga.

Partisipasi yang nyata

Goulet (1971) telah menyatakan secara jelas bahwa partisipasi optimal harus menjadi norma dalam strategi pembangunan. Lebih lanjut menurutnya, jika partisipasi seperti ini tidak diperluas dan tidak benar-benar dilaksanakan, pembangunan akan menghambat upaya rakyat untuk meningkatkan martabat mereka sebagai manusia dan mendapatkan kebebasan fundamental mereka. Partisipasi pembangunan selalu terkait dengan kekuasaan. Pihak yang memegang kekuasaan, baik formal maupun informal, cenderung menggunakan partisipasi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan atau untuk melanggengkan keberadaan pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh kembali kekuasaan yang koruptif oleh elit penguasa.

Menurut Rahnama (1992), fungsi sosial, politik dan instrumental dari partisipasi telah sering digunakan sebagai acuan oleh para praktisi pembangunan di daerah pedesaan yang hasilnya tercermin pada swadaya masyarakat, masyarakat mandiri, dan lain-lain. Namun partisipasi untuk mendorong wacana alternatif dan memperkuat penciptaan pengetahuan lokal serta sistem pengetahuan hampir tidak tersentuh, sementara substansi hegemoni dan penindasan orang miskin, khususnya di daerah pedesaan, berakar pada pengendalian wacana dan pengetahuan yang tanpa sadar dan terpaksa telah digunakan juga oleh mereka yang tertindas serta menghapus inisiatif lokal sehingga mengancam sendi-sendi keberlanjutan kehidupan mereka. Pengetahuan dan kearifan lokal sering diperlakukan sebagai sesuatu yang kuno dan bertentangan dengan pembangunan. Praktisi pembangunan (pemerintah, donor, LSM, dll) mengabaikan fakta bahwa pengetahuan dan kearifan inilah yang membuat masyarakat mampu untuk bertahan dan menciptakan strategi, teknik, serta teknologi untuk dapat mempertahankan kehidupan mereka sebagai individu dan sebagai suatu komunitas. Partisipasi murni hanya dapat didorong hingga ikut berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan termasuk MDGs, jika kegiatan atau program sejalan dan berdasarkan inisiatif, pengetahuan, kearifan serta kapasitas lokal.

Pengalaman Kebumen dan Mamuju, bahwa masyarakat desa sudah memiliki RPJMDesa yang dibuat melalui proses partisipasi yang *genuine*, menunjukkan bahwa makin tinggi *sense of ownership* dari program pembangunan makin tinggi potensi untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang mereka rancang sendiri, termasuk pencapaian MDGs yang indikator-indikatornya bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Di banyak kabupaten, RPJMDesa dibuat oleh tenaga ahli dari luar, entah oleh fasilitator PNPM (Kabupaten Kupang—fasilitator PNPM lebih berkuasa dari Camat dan Kepala Desa) atau tim Sarjana Masuk Desa (seperti di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar), dan dibutuhkan waktu yang lama untuk warga desa untuk memahami isi dokumen RPJMDesa dan untuk menyesuaikan diri dengan program-program pembangunan yang merujuk pada RPJMDesa buatan pihak lain. Di beberapa kabupaten, bahkan RPJMDesa itu sama dari satu desa ke desa lain, hanya nama desa saja yang berbeda; dan kadang-kadang hanya di halaman pertama yang nama desanya berbeda, sementara di bagian isi dokumen nama desa sama semua.

Dibutuhkan tim fasilitator yang andal, berkomitmen, dan berdedikasi untuk memfasilitasi proses partisipasi yang *genuine* ini, terutama jika tingkat pendidikan masyarakat desanya rendah. FORMASI (Forum Masyarakat Sipil) dan PKM (Perkumpulan Keberdayaan Masyarakat) di Kebumen, LPMP dan JARI di Mamuju, dan JARI di Maros; dan Yayasan Alfa Omega di Kupang adalah beberapa di antara LSM yang telah menjalankan proses ini dengan sangat tekun, dan mendatangkan hasil yang cukup berarti.

Sinergi antara kebijakan dan program

Salah satu sumber utama kegagalan pembangunan adalah inkoherensi dalam kebijakan dan kerangka kelembagaan. Koherensi kebijakan meliputi promosi sistematis dari kebijakan lintas departemen dan lembaga pemerintah yang saling menguatkan dan menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan lembaga-lembaga yang berbeda bekerja sama

dengan cara-cara sedemikian rupa yang menghasilkan sarana dan produk yang lebih kokoh bagi semua pihak terkait. Dengan mengembangkan koherensi kebijakan akan ada sinergi dan saling melengkapi antara wilayah kebijakan yang berbeda untuk memenuhi tujuan umum dan tujuan bersama. Untuk meningkatkan pembangunan dan upaya untuk mencapai sasaran MDGs harus ada mekanisme atau peluang dan ruang bagi semua pihak yang terkait untuk saling mengisi kesenjangan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh suatu kementerian tidak selaras dengan kebijakan dari departemen lain, bahkan itu juga terjadi di antara kementerian-kementerian di bawah satu koordinasi kementerian yang sama. Hal ini memengaruhi inkoherensi dalam kebijakan dan program pada pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi. Media publik dan elit pemerintahan menganggap permasalahan seperti ini sebagai ego-sektoral dan sering kali berdalih pada lemahnya kapasitas pemerintah daerah sebagai penyebabnya. Padahal, kepemimpinan politik di kementerian pada pemerintahan pusat serta perilaku mencari rentedari birokrat dan politisi juga menjadi salah satu penyebab utamanya.

Hal ini bukanlah merupakan tugas yang mudah, terutama dalam lingkungan politik yang pluralistik—berbagai pihak memiliki kepentingan yang saling bersaing atau bahkan bertentangan terutama berkaitan dengan program dan anggaran pembangunan. Hal ini juga menjadi tidak mudah ketika masih ada saling dorong dan tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen-dokumen kebijakan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan (RKP) sebenarnya telah dirancang dalam kerangka koherensi yang baik, tetapi sering diabaikan.

Salah satu contoh yang baik adalah Musrenbang, yang pada awalnya adalah proses yang transformatif jika dilihat posisinya dalam Undang-undang perencanaan pembangunan nasional. Namun dalam prakteknya, Musrenbang digunakan hanya untuk mendapatkan legitimasi dari apa yang telah dirancang oleh pejabat pemerintah dan konsultan untuk program pembangunan tahun berikutnya. Gagasan dan rekomendasi dari masyarakat lokal hampir tidak pernah terakomodasi dalam program pembangunan. Hal yang lebih buruk adalah bahwa program tertentu melakukan Musrenbangnya sendiri dan terpisah dari Musrenbang untuk perencanaan pembangunan nasional, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa Musrenbang lebih bersifat seremonial dan merupakan "proyek" dari pelaksana ketimbang mengakomodasi kebutuhan dan hak masyarakat dalam proses pembangunan.

Koherensi harus mencakup beberapa aspek: makna atau wacana, kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan program pembangunan. Untuk memastikan koherensi dari makna, kebijakan, dan implementasi program, harus ada kepemimpinan yang kuat di pemerintahan yang menyediakan pedoman yang kuat dan berwibawa serta interpretasi yang jelas tentang makna dan wacana yang terkait dengan kebijakan dan implementasinya dalam program dan proyek.

Koherensi atau sinergi ini menjadi hal yang paling mahal di Indonesia. Hampir semua kabupaten yang dikunjungi selama bulan April – Mei 2012 baru memahami MDGs pada 2008, dan mulai mengintegrasikan dalam RPJMD atau RKP tahunan sejak 2011. Program-program yang dijalankan seperti PNPM, PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin), dan sebagainya hampir semuanya tidak terkait MDGs. PNPM baru diintegrasikan dalam Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten sejak 2011, dan diarahkan untuk mendukung pencapaian MDGs terutama dalam bidang infrastruktur dan ekonomi rakyat. Proyek-proyek fisik yang dijalankan oleh PNPM, yang didasarkan pada usulan atau hasil perencanaan partisipatif warga desa, seperti di Desa Pandansari, Kebumen, mulai memberikan hasil yang terarah dan warga desa turut berpartisipasi dan merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya.

Di daerah-daerah lain, program-program pembangunan hampir tidak saling terkait meskipun target penerimanya sama. Pejabat Kepala Dinas Pendidikan di Maros, misalnya, mengeluh karena

program seperti PKH dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) bisa berkaitan dengan pendidikan anak sekolah dan pendidikan buta huruf perempuan namun program-program ini tidak saling terkait. Hal ini menyebabkan *transaction costs* (biaya transaksi) yang tinggi dan *real costs* (biaya riil) yang berlebihan yang seharusnya tidak terjadi jika semua pihak yang memiliki program yang searah bisa dikoordinasikan secara memadai. Program pembangunan desa yang dibiayai ADD (Alokasi Dana Desa), di Mamuju, sekarang mulai disinergikan dengan program taktis dari DPRD. Proyek yang tidak bisa dibiayai ADD, sementara proyek tersebut dipandang penting untuk masyarakat, bisa didukung oleh proyek taktis dari DPRD.

Sinergi antar-proyek bisa membantu percepatan pembangunan di tingkat desa. Dana-dana dari Pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh: Kabupaten Kubu Raya membutuhkan puskesmas terapung dan ambulans air yang cepat beroperasi di sungai-sungai. DAK untuk kesehatan yang ditransfer dari pusat dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit daerah. Kabupaten Kubu Raya masih belum membutuhkan Rumah Sakit Daerah karena masih bisa mengakses layanan Rumah Sakit Umum di Pontianak. Yang dibutuhkan oleh Kubu Raya adalah puskesmas yang *mobile* dan perangkat pendukung seperti ambulans sungai. Dana Alokasi Khusus ini terpaksa tidak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan kebutuhan di kabupaten Kubu Raya. Karena itu, pemerintah pusat perlu untuk memahami kondisi daerah dan bahkan harus hadir langsung di daerah untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat tentang kebutuhan daerah.

Infrastruktur desa

Dari semua kabupaten yang diteliti, hampir semua pemerintah mengeluh masalah infrastruktur, terutama perhubungan namun tidak ada yang mempunyai perencanaan yang sistematis untuk memecahkan masalah infrastruktur pedesaan. Padahal semua sepakat bahwa infrastruktur pedesaan amat penting baik untuk pembangunan ekonomi maupun untuk pelayanan publik. Di Halmahera Utara, hampir semua desa sudah terjangkau jalan raya yang berkualitas baik. Komunikasi dan mobilitas penduduk pun meningkat dan pelayanan publik dalam bidang kesehatan juga turut meningkat. Di Kabupaten Manggarai, NTT, hampir semua desa sudah terjangkau jalan raya dan sebagian sudah dijangkau jalan aspal. Pada saat panen cengkeh, petani bisa menjangkau pasar dengan lebih mudah dan bisa mendapatkan harga yang tinggi. Demikian pula pelayanan kesehatan sudah mudah dijangkau karena Puskesmas dan dokter bisa dijangkau dengan cepat berkat infrastruktur jalan yang baik.

Pelayanan kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak, air dan sanitasi pedesaan amat penting. Pemerintah lebih mengutamakan perumahan, air dan sanitasi di perkotaan, sementara pedesaan seolah-olah ditelantarkan padahal jumlah terbesar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan. Indonesia mempunyai Kementerian Perumahan Rakyat tetapi lebih banyak membangun hunian di perkotaan.

Peran DPR dan DPRD

Forum Masyarakat Sipil untuk MDGs yang dibentuk di beberapa daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan DPRD di daerah-daerah tersebut dengan menggunakan Kartu Penilaian Bersama. Untuk SKPD nilainya bervariasi, sementara untuk DPRD rata-rata sangat rendah, kecuali Kota Padang Panjang. Ini menunjukkan bahwa rakyat menilai kinerja DPRD jauh dari harapan. Ada beberapa anggota DPR yang turun ke daerah yang membicarakan khusus tentang pencapaian MDGs, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, AKI (Angka Kematian Ibu) dan Angka Kematian Bayi. Hal ini terutama dilakukan oleh anggota DPR perempuan. Untuk Provinsi yang tidak mempunyai anggota DPR perempuan, seperti NTT, sangat sulit diharapkan ada *monitoring* MDGs oleh anggota-anggota DPR.

Hal seperti ini juga terjadi di DPRD. Asumsi utama dalam desentralisasi adalah bahwa pejabat publik, yang dipilih dari antara orang-orang yang diketahui masyarakat, memiliki kepedulian terhadap nasib rakyatnya atau mengetahui persoalan rakyat. Dalam kenyataannya, rumusan kebijakan yang diperjuangkan oleh legislatif lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dan kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat. Dalam banyak kasus DPRD bisa menggunakan kekuasaannya untuk membendung inisiatif-inisiatif seperti MDGs untuk masuk di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan APBD. Usulan rakyat melalui Musrenbang sering disingkirkan untuk memenuhi kepentingan anggota-anggota DPRD. Sehingga muncul istilah “*RKPD by Musrenbang*” dan “*RKPD by phone*” (Rencana Kerja Tahunan Daerah yang dipesan oleh anggota DPRD untuk kepentingannya sendiri atau kroninya).

Di beberapa daerah, DPRD sangat responsif terhadap MDGs dan memandang MDGs lebih mudah dipakai untuk memonitor kinerja pemerintah daerah. Di Kota Padang Panjang dan Maros, Pimpinan DPRD sangat proaktif menanyakan kepada SKPD secara regular tentang capaian MDGs. Unikny, di Maros pimpinan DPRD adalah perempuan dan anggota DPRD yang terjun di dalam program pencapaian MDGs adalah laki-laki dan perempuan, sementara di Kota Padang Panjang pimpinan DPRD adalah laki-laki dan memimpin mayoritas laki-laki yang mempunyai perhatian cukup untuk pencapaian MDGs.

Rakyat di daerah akan memiliki persepsi yang sangat positif ketika wakil-wakilnya di pusat memahami dan memperbincangkan hak-hak mereka yang terumuskan dengan baik di dalam MDGs. DPRD masih belum sepenuhnya memahami MDGs. Diperlukan waktu dan mekanisme khusus untuk memperkenalkan MDGs kepada anggota-anggota DPRD. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah daerah karena tanpa pemahaman yang sama tentang MDGs, amat sulit bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai yang disetujui oleh DPRD. Di Kabupaten Kubu Raya, perpecahan antara Bupati dan beberapa SKPD di satu pihak dan Wakil Bupati dan DPRD di pihak lain, membuat sulit bagi Bupati untuk mengajukan anggaran yang memadai untuk pencapaian MDGs. Konflik politik antar-elite sering kali diselesaikan melalui kompromi anggaran dan proyek.

SIMPULAN

Menuju Pasca 2015

Indonesia sebenarnya sudah memiliki hampir semua kerangka institusional yang cukup kuat dan memadai sebagai petunjuk dan fondasi untuk pembangunan berkelanjutan ke depan. Indonesia mempunyai Undang-Undang Perencanaan Pembangunan yang memungkinkan partisipasi rakyat secara penuh mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional. Indonesia juga sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Jika Musrenbang dijalankan dengan lebih bermakna dan sistematis, maka ada beberapa aspek pembangunan bisa sekaligus tercapai. Pemerataan bisa tercapai; alokasi anggaran di masing-masing daerah sesuai dengan rencana masing-masing daerah; inklusivitas bisa tercapai karena adanya partisipasi yang nyata dari masyarakat melalui berbagai program seperti Musrenbang, PKK, PKH, dan sebagainya; dan pemberdayaan dan *community-resilience* (ketahanan masyarakat), yang melalui perencanaan pembangunan partisipatif warga desa pun memahami aspek-aspek yang membantu mereka untuk swasembada dan swadaya.

Meskipun demikian, ada beberapa masalah utama yang harus dipecahkan dari awal. Pertama, koherensi dan koordinasi baik antara pusat dan daerah, maupun antar-instansi di dalam pemerintahan daerah dan antar-instansi di pemerintah pusat. Kedua, pemerintah lokal yang transparan. Bupati dan

walikota atau gubernur di daerah tidak akan menjadi “raja-raja” kecil jika monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara terbuka oleh masyarakat umum. Ketiga, pembangunan berbasis masyarakat: *ownership* dan partisipasi tetap menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan mulai dari daerah sampai pusat tetap harus berpusat pada rakyat. Rakyat yang menjadi sumber gagasan-gagasan dan visi pembangunan dan rakyat juga menjadi sasaran pembangunan.

Pemerintah sebaiknya mulai merancang suatu kerangka bersama untuk merumuskan tujuan-tujuan pembangunan Pasca-2015 dengan mengacu kepada beberapa prasyarat dasar: (a) Pemerintahan yang transparan dan partisipatif; (b) Partisipasi masyarakat yang penuh; dan (c) Pembangunan berbasis masyarakat. Keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan akan sangat bergantung pada tiga fondasi dasar tersebut.

Untuk pasca-2015, penulis mengusulkan agar beberapa tujuan MDGs bisa dimodifikasi, sementara aspek-aspek lain yang sangat substansial untuk Indonesia dimasukkan, antara lain: (1) Kemiskinan, sanitasi, perumahan dan air minum dijadikan satu tujuan; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Pemberdayaan perempuan; (5) *Early Childhood Care and Development* (ECCD); (6) Lingkungan, hutan, laut, pantai dan perubahan iklim; (7) Infrastruktur pedesaan: transport, komunikasi, energi dan listrik; (8) Kohesi dan Inklusi sosial, dan (9) Pemerintahan yang transparan dan partisipatif, termasuk anti-korupsi. Di samping merumuskan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals* – SDGs), penting juga untuk membuat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Kinerja kementerian di Pusat dan pemerintah daerah dinilai dari capaian-capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G. J. (2010). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri: Proyek Buta Tuli terhadap Aspirasi Masyarakat Desa. *Riset PNPM INFID*, diakses 1 Agustus 2014 dari <http://id.scribd.com/doc/44576107/Laporan-Studi-Riset-tentang-PNPM-oleh-INFID>
- Dahniar & Lasimpo, D. (2008). Menebarkan Dana Menuai Kemiskinan: PPK (Program Pengembangan Kecamatan), Program Pengentasan Kemiskinan Bank Dunia di Sulawesi Tengah. Diakses 2 Juli 2014 dari *Working Paper No. 2 INFID*, <http://infid.org/pdfdo/1374165148.pdf>.
- Departemen Dalam Negeri. (2007). *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Diakses 3 Juli 2014 dari <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/pto09.pdf>
- Depoe, S. P., & Delicath, J. W. (Eds.). (2004). *Communication and Public Participation in Environmental Decision Making*. New York: State University of New York.
- Goulet, D. (1971). *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*. New York: Atheneum Press.
- Hasan, Z. (2013). Sambutan Menteri Kehutanan dalam Acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Indonesia (BMI) tahun 2013. Diakses 22 Juli 2014 dari <http://www.dephut.go.id/uploads/files/10536c3fa965312cf408e067ccaed530.pdf>

- Jawa Pos News Network. (2013, 17 Desember). *Angka Drop Out di Kelas 1-3 SD Tinggi: Dipicu Trauma Siswa yang Baru Beradaptasi*. Diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2013/12/17/206094/Angka-Drop-Out-di-Kelas-1---3-SD-Tinggi->
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2009). *Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang*. Diakses 14 Agustus 2014 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/03/Catatan-Tahunan-Kekerasan-terhadap-Perempuan-tahun-2009-edisi-Launching.pdf>
- Rahmena, M. (1992). Participation. Dalam W. Sachs (Ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London Jersey: Zed Books.
- The World Food Program (WFP). (2009). *Peta Kerawanan Pangan Indonesia*. Diakses 15 Juli 2014 dari <http://www.foodsecurityatlas.org/idn/country/fsva-2009-peta-ketahanan-dan-kerentanan-pangan-indonesia/peta-kerentanan-terhadap-kerawanan-pangan-indonesia/view>
- United Nations-Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA). (2007). *Toward Participatory and Transparent Governance: Reinventing Government*. New York: United Nations.
- United Nations. (2004). *World Population to 2030*. Diakses 20 Agustus 2014 dari <http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf>